

PUBLIC VALUE DALAM PROGRAM GERAKAN SAYANG PEREMPUAN OJEK ONLINE (GASPOL) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN OJOL PEREMPUAN

Wahyu Ida Nurmasriyanti¹, Lukman Arif²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email Korespondensi: wahyuidan1710@gmail.com

ABSTRACT

Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) Program is a women's empowerment program implemented by the East Java Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Population Affairs (DP3AK) for women online motorcycle taxi drivers. This study aims to analyze the public value created through the implementation of the GASPOL Program using the dimensions of service, outcomes, and trust/legitimacy proposed by Kelly et al. (2002). This research used a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles et al., (2014). The results show that the GASPOL Program has created public value through all three dimensions. In the service dimension, public value can be seen from training activities that match participants' needs, a supportive service approach, and easy access to information and assistance. In the outcomes dimension, the program provides benefits such as improved skills, business opportunities, increased self-confidence, and social support. In the trust/legitimacy dimension, participants trust the program implementers because of consistent activities, open communication, and ongoing assistance. The public values created include economic value, social value, empowerment value, equality value, independence value, and protection value. However, some participants still face challenges in developing their businesses, and continuous mentoring remains an important issue. Overall, the GASPOL Program has provided positive benefits and created public value for women online motorcycle taxi drivers through empowerment activities that support their needs and development.

Keywords: GASPOL, Women empowerment, Women online motorcycle taxi drivers, Public value.

ABSTRAK

Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur bagi perempuan pengemudi ojek online. Penelitian ini bertujuan menganalisis penciptaan *public value* dalam pelaksanaan Program GASPOL menggunakan dimensi *service*, *outcomes*, dan *trust/legitimacy* dari Kelly et al., (2002). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al., (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program GASPOL telah menciptakan *public value* melalui ketiga dimensi yang diteliti. Pada dimensi *service*, nilai publik terlihat dari pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta, pendekatan pelayanan yang komunikatif, serta kemudahan akses informasi dan pendampingan. Pada dimensi *outcomes*, program memberikan manfaat berupa peningkatan keterampilan, peluang usaha, rasa percaya diri, dan dukungan sosial bagi peserta. Sementara itu, pada dimensi *trust/legitimacy*, nilai publik terlihat dari terbentuknya kepercayaan peserta terhadap pelaksana program melalui konsistensi pelaksanaan kegiatan, keterbukaan komunikasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Nilai publik yang tercipta meliputi nilai ekonomi, sosial, pemberdayaan, kesetaraan, kemandirian, dan perlindungan. Meskipun demikian, keberlanjutan pendampingan dan pengembangan usaha peserta masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.

Kata kunci: GASPOL, Pemberdayaan perempuan, Perempuan pengemudi ojek online, Public value.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

219

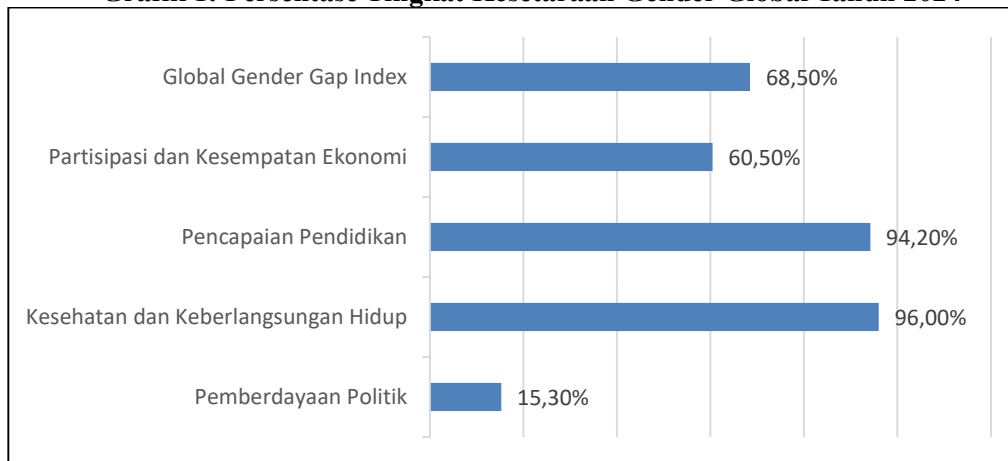
Indexed



PENDAHULUAN

Perempuan memiliki peran yang semakin penting dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam bidang ekonomi dan kehidupan publik. Meningkatnya keterlibatan perempuan di berbagai sektor menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Namun demikian, kesempatan yang dimiliki perempuan belum sepenuhnya setara dengan laki-laki. Berbagai hambatan sosial dan struktural masih memengaruhi akses perempuan terhadap pekerjaan, posisi kepemimpinan, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut tercermin dalam laporan Global Gender Gap Index tahun 2024 yang diterbitkan oleh World Economic Forum. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 146 negara dengan skor kesetaraan gender sebesar 68,6%. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih cukup terlihat, terutama pada aspek partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik perempuan. Sementara itu, bidang pendidikan dan kesehatan menjadi aspek yang memiliki capaian relatif lebih baik dibandingkan dimensi lainnya (World Economic Forum, 2024). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap peluang ekonomi serta kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam ruang publik dan pengambilan keputusan.

Grafik 1: Persentase Tingkat Kesetaraan Gender Global Tahun 2024



Berbagai tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender mendorong pemerintah untuk mengambil peran melalui kebijakan dan program yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan perempuan. Dalam konteks tersebut, kebijakan publik menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk merespon berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat sekaligus untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini menekankan pentingnya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan maupun laki-laki di berbagai sektor pembangunan (Rosramadhana et al., 2022). Untuk mengukur perkembangan pelaksanaannya, pemerintah menggunakan beberapa indikator pembangunan gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimbangan Gender (IKG) (Ikhwan et al., 2024).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir pembangunan gender di Indonesia cenderung mengalami perkembangan yang positif. Nilai IPG meningkat dari 91,06 pada tahun 2020 menjadi 91,85 pada tahun 2024, sedangkan nilai IDG meningkat dari 75,57 menjadi 77,62 pada periode yang sama. Sementara itu, nilai IKG mengalami penurunan dari 0,472 menjadi 0,421 yang menunjukkan berkurangnya tingkat ketimpangan gender (Badan Pusat Statistik, 2024a, 2024b, 2024c). Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan terwujudnya kesetaraan gender secara optimal. Kesenjangan masih ditemukan terutama dalam aspek ekonomi, seperti kesempatan kerja, tingkat pendapatan, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Tantangan serupa juga masih dijumpai di tingkat daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Meskipun nilai IPG dan IDG Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, capaian IDG provinsi ini masih berada di bawah rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik, 2024a, 2024b, 2024c). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Jawa Timur masih menghadapi berbagai kendala dalam memperluas akses terhadap peluang ekonomi maupun partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi perempuan, tetapi juga mencakup perlindungan sosial serta penguatan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu kelompok perempuan yang masih menghadapi berbagai tantangan tersebut adalah perempuan pengemudi ojek online. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan perempuan dalam sektor transportasi daring terus meningkat. Bagi sebagian perempuan, pekerjaan ini menjadi alternatif untuk memperoleh penghasilan sekaligus memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja. Fleksibilitas tersebut memungkinkan mereka tetap menjalankan tanggung jawab domestik sambil membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Dinansyah et al., 2023). Selain itu, pekerjaan sebagai pengemudi ojek online relatif mudah diakses karena tidak mensyaratkan tingkat pendidikan maupun keterampilan formal tertentu.

Di balik fleksibilitas yang ditawarkan, perempuan pengemudi ojek online juga menghadapi berbagai kerentanan dalam pekerjaannya. Aries Kurniawan (2024) menjelaskan bahwa perempuan ojol masih kerap menghadapi stigma dan diskriminasi karena bekerja pada sektor yang selama ini lebih identik dengan laki-laki. Mereka juga rentan mengalami pelecehan seksual, perlakuan yang tidak menyenangkan, serta berbagai risiko keamanan saat bekerja di jalan. Di sisi lain, sebagian besar perempuan ojol tetap menjalankan tanggung jawab domestik sehingga harus membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan beban ganda yang berdampak pada terbatasnya waktu untuk beristirahat maupun mengembangkan diri (2021). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor informal belum selalu diikuti oleh perlindungan dan dukungan yang memadai.

Melihat berbagai persoalan yang dihadapi perempuan pengemudi ojek online menunjukkan pentingnya upaya pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan, akses, dan kekuatan individu maupun kelompok agar mampu menentukan kehidupan mereka sendiri secara lebih mandiri. Dalam konteks perempuan, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas, perluasan akses terhadap sumber daya, peningkatan partisipasi, serta terciptanya posisi yang lebih setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Melalui pemberdayaan, perempuan diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi ketergantungan terhadap kondisi yang membuat mereka rentan secara sosial maupun ekonomi. Cornwall (2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan, akses terhadap sumber daya, serta kepercayaan diri perempuan agar mampu mengambil keputusan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan semata, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kemandirian dan kontrol perempuan terhadap kehidupannya sendiri. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penguatan kapasitas ekonomi, serta perlindungan sosial yang mampu membantu perempuan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk respon terhadap persoalan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menghadirkan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL). Program ini merupakan inovasi pemberdayaan perempuan yang secara khusus ditujukan bagi perempuan pengemudi ojek online di Jawa Timur. Program GASPOL dibentuk pada tahun 2022 setelah adanya pertemuan antara Gubernur Jawa Timur dengan sejumlah perempuan pengemudi ojol yang menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi selama bekerja di jalan. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pengemudi ojol karena tuntutan ekonomi keluarga, namun di sisi lain tetap harus menjalankan tanggung jawab domestik sebagai ibu rumah tangga. Selain menghadapi beban ganda,

perempuan ojol juga berada dalam kondisi rentan terhadap pelecehan seksual, diskriminasi gender, hingga risiko keamanan ketika bekerja di ruang publik.

Melalui Program GASPOL, pemerintah berupaya menghadirkan pemberdayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan pengemudi ojol. Program ini memiliki berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pelatihan usaha, pendampingan, sosialisasi, advokasi, hingga pengembangan kapasitas rohani dan mental bagi peserta. Pelatihan yang diberikan diarahkan untuk membantu perempuan ojol memiliki kemampuan usaha mandiri sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai pengemudi ojek online. Selain itu, program ini juga bertujuan membantu peserta memperoleh alternatif pekerjaan yang dinilai lebih aman dan berkelanjutan dibandingkan bekerja di jalan dengan tingkat risiko yang cukup tinggi. Pelaksanaan Program GASPOL juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan perempuan ojol yang selama ini sering kali sulit memperoleh ruang pengembangan diri akibat tuntutan pekerjaan dan kondisi ekonomi. Dalam program ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai kelas pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, seperti pelatihan keterampilan usaha, pengelolaan produk, hingga pengembangan usaha kecil. Tidak hanya itu, peserta juga memperoleh pendampingan dan advokasi sebagai bentuk dukungan sosial terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi selama bekerja sebagai pengemudi ojol. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada upaya perlindungan dan penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial.

Dalam pelaksanaannya, Program GASPOL dinilai mampu memberikan manfaat bagi perempuan pengemudi ojol, khususnya dalam peningkatan keterampilan dan pengembangan usaha. Peserta memperoleh berbagai bentuk dukungan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, sosialisasi, dan advokasi yang membantu meningkatkan kemampuan ekonomi sekaligus perlindungan sosial mereka. Program ini juga menjadi ruang bagi perempuan ojol untuk memperoleh pengembangan diri yang sebelumnya sulit mereka dapatkan karena kesibukan bekerja di jalan. Dengan adanya program tersebut, perempuan pengemudi ojol diharapkan mampu memiliki usaha mandiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan di sektor transportasi daring yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi. Akan tetapi, implementasi Program GASPOL masih menghadapi beberapa kendala. Marlia et al. (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tingkat partisipasi peserta masih belum maksimal karena sebagian peserta harus memilih antara mengikuti pelatihan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Selain itu, keterbatasan dukungan modal usaha, sumber daya, dan tindak lanjut pasca program juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi program, dari total 215 anggota GASPOL, baru sekitar 51% peserta yang telah memiliki usaha mandiri, sementara sebagian lainnya masih bergantung pada pekerjaan sebagai pengemudi ojek online. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masih memerlukan penguatan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh kelompok sasaran.

Meskipun berbagai kegiatan pemberdayaan telah dilaksanakan, keberhasilan suatu program tidak hanya dapat diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana maupun jumlah peserta yang mengikuti program. Sebagai organisasi publik, pemerintah dituntut untuk mampu menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Dengan kata lain, keberhasilan program tidak hanya terletak pada terlaksananya kegiatan, tetapi juga pada nilai yang berhasil diciptakan bagi masyarakat melalui program tersebut. Dalam konteks organisasi publik, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari capaian administratif atau jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program mampu memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Moore (1995) menjelaskan bahwa organisasi publik dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan dan layanan yang diberikan mampu menghasilkan nilai publik (*public value*) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Kelly, Mulgan, dan Muers (2002) menjelaskan bahwa *public value* tidak hanya menekankan pada hasil akhir program, tetapi juga pada kualitas layanan (*service*), manfaat yang dirasakan masyarakat (*outcomes*), serta adanya kepercayaan publik terhadap program yang dijalankan (*trust/legitimacy*). Oleh karena itu,

keberhasilan program pemberdayaan perempuan tidak hanya dilihat dari jumlah peserta atau pelaksanaan program, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menciptakan perubahan dan manfaat nyata bagi perempuan pengemudi ojek online. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *public value* dalam Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) sebagai upaya pemberdayaan perempuan pengemudi ojek online di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Analisis dilakukan menggunakan dimensi *public value* yang meliputi *service*, *outcomes*, dan *trust/legitimacy* untuk melihat sejauh mana program mampu memberikan manfaat dan nilai yang benar-benar dirasakan oleh perempuan ojol sebagai kelompok sasaran program.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui penggalan makna, pengalaman, serta pandangan individu maupun kelompok tertentu (Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai *public value* dalam Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai publik terbentuk melalui komponen *service*, *outcomes*, dan *trust/legitimacy* dalam pelaksanaan program pemberdayaan bagi perempuan pengemudi ojek online. Penelitian dilaksanakan di DP3AK Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana Program GASPOL dengan melibatkan beberapa informan, yaitu Kepala Bidang PPKG DP3AK Provinsi Jawa Timur, koordinator lapangan GASPOL, serta peserta Program GASPOL. Keterlibatan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan manfaat program baik dari sudut pandang pelaksana maupun penerima manfaat. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Kaharuddin, 2021). Teknik ini digunakan karena peneliti membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam Program GASPOL. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang mendalam terkait pelaksanaan program. Selanjutnya, analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), *data collection* (pengumpulan data) dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan). Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan *membercheck* agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

PEMBAHASAN

Public Value dalam bentuk Layanan Pelatihan Program Pemberdayaan (service)

Dalam perspektif *public value*, layanan (*service*) tidak hanya dipahami sebagai penyediaan layanan kepada masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana layanan tersebut mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan penerima layanan. Kelly et al., (2002) menjelaskan bahwa nilai layanan dapat tercipta ketika masyarakat merasakan manfaat dari layanan yang diberikan serta memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dimensi layanan dalam *public value* tidak hanya menilai bagaimana suatu program dilaksanakan, tetapi juga bagaimana manfaat dan pengalaman dari layanan tersebut dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, *public value* dalam dimensi layanan (*service*) pada Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) terlihat melalui kualitas layanan program, etos dan budaya pelayanan, serta keadilan dan kemudahan akses yang diberikan kepada peserta. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga pada upaya memenuhi kebutuhan peserta dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh perempuan pengemudi ojek online sebagai sasaran program. Pada aspek kualitas layanan,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AK Provinsi Jawa Timur berupaya menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi peserta melalui proses pendataan, pemetaan minat, dan asesmen sebelum pelatihan dilaksanakan. Melalui proses tersebut, peserta dapat memperoleh pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Selain itu, materi pelatihan juga disusun secara terarah dengan jumlah peserta yang dibatasi agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Peserta program menilai bahwa pelatihan yang diberikan mampu menambah keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dalam Program GASPOL tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan pelatihan, tetapi juga dari manfaat yang diperoleh peserta setelah mengikuti program.

Selain kualitas layanan, dimensi *service* juga terlihat dari etos dan budaya pelayanan yang diterapkan oleh pelaksana program. DP3AK berupaya menciptakan pelayanan yang terbuka, komunikatif, dan tidak kaku melalui pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta komunikasi yang dilakukan melalui grup WhatsApp. Pendekatan tersebut membuat peserta merasa lebih nyaman untuk mengikuti kegiatan, menyampaikan kebutuhan, maupun berdiskusi terkait berbagai hal yang mereka hadapi. Sikap pelaksana program yang responsif dan kooperatif juga memberikan kesan bahwa peserta tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang didengar dan diperhatikan selama program berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan program, tetapi juga pada bagaimana hubungan yang terjalin antara pelaksana program dan peserta dapat mendukung proses pemberdayaan. Selanjutnya, nilai layanan juga terlihat melalui adanya keadilan dan kemudahan akses dalam pelaksanaan program. Informasi mengenai pelatihan disampaikan melalui grup WhatsApp, komunitas ojol perempuan, serta jejaring antar peserta sehingga memudahkan perempuan pengemudi ojek online untuk memperoleh informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan menjadi prioritas agar kesempatan memperoleh manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata. Pelaksanaan kegiatan juga disesuaikan dengan kondisi peserta yang memiliki tanggung jawab domestik maupun pekerjaan sebagai pengemudi ojol. Peserta diberikan kebebasan untuk menentukan keikutsertaan dalam kegiatan sesuai dengan kondisi dan waktu yang dimiliki tanpa adanya paksaan dari pelaksana program. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kesempatan yang lebih setara bagi perempuan ojol dalam mengakses kegiatan pemberdayaan.

Layanan dalam Program GASPOL juga menghasilkan berbagai nilai publik yang dirasakan langsung oleh peserta program, yaitu nilai ekonomi, sosial, pemberdayaan dan kesetaraan. Nilai ekonomi terlihat dari bertambahnya keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan tambahan maupun membuka peluang usaha di luar pekerjaan utama sebagai pengemudi ojek online. Nilai sosial terlihat dari terbentuknya hubungan yang saling mendukung antar peserta maupun antara peserta dan pelaksana program. Selain itu, peserta juga merasakan adanya penghargaan sosial karena mereka merasa lebih dihargai, diperhatikan, dan tidak dipandang sebelah mata sebagai perempuan pekerja di sektor informal. Sementara itu, nilai pemberdayaan terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri, semangat, dan keberanian peserta untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Serta nilai kesetaraan yang terlihat dari adanya kesempatan yang lebih terbuka bagi perempuan pengemudi ojek online untuk memperoleh informasi dan mengikuti kegiatan pemberdayaan sesuai dengan kondisi mereka. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Putri dan Harsono (2024) yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan mampu menciptakan nilai publik melalui peningkatan partisipasi dan kemandirian perempuan. Dalam konteks Program GASPOL, nilai publik tidak hanya tercipta melalui hasil pelatihan yang diberikan, tetapi juga melalui manfaat sosial, dukungan, serta pengalaman pelayanan yang dirasakan peserta selama mengikuti program. Dengan demikian, *public value* dalam dimensi layanan (*service*) pada Program GASPOL tercermin dari upaya DP3AK dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta, menerapkan pendekatan pelayanan yang terbuka dan mendukung, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi perempuan pengemudi ojek online untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan. Layanan

yang diberikan tidak hanya menghasilkan peningkatan keterampilan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, nilai sosial, nilai penghargaan sosial, nilai pemberdayaan, dan nilai kesetaraan yang dirasakan secara langsung oleh peserta program.

Public Value dalam bentuk Hasil Pelatihan Program Pemberdayaan (outcomes)

Dalam perspektif *public value*, dimensi hasil (*outcomes*) berkaitan dengan dampak atau perubahan yang dirasakan masyarakat setelah mengikuti suatu program. Kelly et al., (2002) menjelaskan bahwa *outcomes* tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi juga dari sejauh mana program mampu memberikan manfaat dan perubahan nyata bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, dimensi hasil dalam Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) dapat dilihat dari perubahan yang dirasakan peserta setelah mengikuti pelatihan, pendampingan, dan berbagai bentuk dukungan yang diberikan melalui program. Berdasarkan hasil penelitian, Program GASPOL dirancang untuk mendorong peningkatan kapasitas, kemandirian ekonomi, perlindungan, serta pemberdayaan perempuan pengemudi ojek online. Melalui berbagai pelatihan dan dukungan usaha yang diberikan, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga memiliki peluang untuk menambah pendapatan, mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai ojol, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kualitas hidup mereka. Hal tersebut sejalan dengan dokumen Kerangka Acuan Program GASPOL yang menjelaskan bahwa program diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan pengemudi ojek online melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan dukungan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian peserta telah merasakan manfaat program dalam bentuk tambahan keterampilan dan peluang usaha. Beberapa peserta memanfaatkan hasil pelatihan untuk mengembangkan usaha kecil, seperti usaha makanan, *handycraft*, maupun usaha lain yang didukung melalui bantuan modal dan sarana usaha. Selain itu, terdapat peserta yang mulai mengurangi intensitas bekerja sebagai ojol karena sebagian waktunya digunakan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Kondisi tersebut menunjukkan adanya nilai ekonomi yang tercipta melalui peningkatan kemampuan produktif dan peluang memperoleh pendapatan tambahan di luar pekerjaan utama sebagai pengemudi ojek online. Selain itu, perubahan tersebut juga menunjukkan adanya nilai kemandirian karena peserta mulai memiliki alternatif sumber penghasilan di luar aktivitas mengojol. Selain perubahan pada aspek ekonomi, hasil program GASPOL juga menunjukkan adanya perubahan sosial dan pemberdayaan yang dirasakan peserta. Peserta merasa lebih dihargai, diperhatikan, dan tidak dipandang sebelah mata sebagai perempuan pengemudi ojek online. Kehadiran kegiatan rutin, pendampingan, serta komunikasi antar peserta melalui grup juga membentuk hubungan sosial yang saling mendukung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya nilai sosial berupa rasa kebersamaan, dukungan sosial, dan perhatian terhadap perempuan ojol sebagai kelompok rentan. Di sisi lain, meningkatnya rasa percaya diri, keberanian berbicara, serta kemampuan peserta dalam mengembangkan diri menunjukkan adanya nilai pemberdayaan yang dihasilkan melalui program GASPOL.

Meskipun demikian, hasil program yang dirasakan peserta masih beragam. Terdapat peserta yang telah mampu mengembangkan usaha dan mengurangi aktivitas sebagai ojol, tetapi terdapat pula peserta yang usahanya belum berjalan secara optimal sehingga masih tetap bergantung pada pekerjaan sebagai pengemudi ojek online. Beberapa peserta juga menyampaikan bahwa pendampingan dan dukungan setelah pemberian bantuan usaha masih belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil program pemberdayaan belum dirasakan secara sama oleh seluruh peserta dan masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan hasil program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muthmainnah dan Kartini (2025) yang menjelaskan bahwa program pemberdayaan mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, namun masih menghadapi kendala pada aspek keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil penelitian, *public value* dalam dimensi hasil (*outcomes*) pada Program GASPOL terlihat dari adanya perubahan yang dirasakan peserta, baik dari sisi keterampilan, aktivitas ekonomi, rasa percaya diri, maupun dukungan sosial yang diperoleh setelah mengikuti program. Nilai publik yang

muncul meliputi nilai ekonomi, nilai kemandirian, nilai sosial, dan nilai pemberdayaan. Nilai ekonomi terlihat dari adanya peluang tambahan pendapatan dan usaha produktif yang dimiliki peserta. Nilai kemandirian terlihat dari mulai berkurangnya ketergantungan peserta terhadap pekerjaan sebagai ojol meskipun belum dirasakan secara merata oleh seluruh peserta. Nilai sosial terlihat dari terbentuknya hubungan yang saling mendukung antar peserta, sedangkan nilai pemberdayaan terlihat dari tumbuhnya rasa percaya diri, keberanian, dan kemampuan peserta dalam mengembangkan diri. Dengan demikian, Program GASPOL tidak hanya menghasilkan peningkatan keterampilan secara teknis, tetapi juga menciptakan perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari.

Public Value dalam bentuk Kepercayaan Pelatihan Program Pemberdayaan (*trust/legitimacy*)

Dalam perspektif *public value*, dimensi kepercayaan dan legitimasi (*trust/legitimacy*) berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang pelaksana program serta menilai kelayakan dan kebermanfaatannya suatu program. Kelly et al., (2002) menjelaskan bahwa nilai publik dapat terbentuk ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap institusi penyelenggara dan memandang program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dimensi *trust/legitimacy* dalam Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) dapat dilihat dari kepercayaan peserta terhadap pelaksana program serta pandangan peserta terhadap program sebagai program yang layak dan relevan bagi perempuan pengemudi ojek online.

Berdasarkan hasil penelitian, kepercayaan peserta terhadap pelaksana program terbentuk melalui konsistensi pelaksanaan kegiatan, keterbukaan komunikasi, serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. DP3AK Provinsi Jawa Timur tidak hanya menyelenggarakan pelatihan, tetapi juga tetap menjaga komunikasi dengan peserta melalui grup WhatsApp sebagai sarana berbagi informasi, diskusi, dan pendampingan setelah pelatihan berlangsung. Peserta menilai bahwa pelaksana program bersikap terbuka, responsif, dan tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan peserta. Kondisi tersebut membuat peserta merasa didengar, diperhatikan, dan tidak ditinggalkan setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan. Kepercayaan peserta juga muncul karena program dipandang dilaksanakan secara serius dan profesional. Hal ini terlihat dari upaya pelaksana program dalam menghadirkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta serta melibatkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Berbagai pelatihan yang diberikan, seperti keterampilan usaha, hukum, politik, pembinaan sosial, hingga self defense, dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga maupun praktisi yang memiliki kompetensi sesuai bidang pelatihan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pelaksana program untuk menghadirkan kegiatan pemberdayaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi peserta.

Selain kepercayaan terhadap pelaksana program, dimensi *trust/legitimacy* juga terlihat dari pandangan peserta terhadap Program GASPOL sebagai program yang layak dan sesuai dengan kebutuhan perempuan pengemudi ojol. Pelaksanaan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi peserta, penggunaan narasumber yang kompeten, serta manfaat program yang dirasakan secara langsung membuat peserta memandang bahwa program GASPOL mampu memberikan pembekalan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Keberadaan dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kegiatan dan Petunjuk Teknis (Juknis) program juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program memiliki dasar, tujuan, sasaran, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas. Hal tersebut memperlihatkan adanya upaya pelaksana program dalam menghadirkan program pemberdayaan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan sasaran program. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa legitimasi program tidak hanya terbentuk karena adanya perencanaan dan pelaksanaan yang jelas, tetapi juga karena peserta merasakan manfaat secara langsung dari kegiatan yang diberikan. Pelatihan seperti *self defense*, kelas hukum, keterampilan usaha, dan pembinaan sosial dinilai relevan dengan kondisi serta kerentanan yang dihadapi perempuan pengemudi ojol dalam kehidupan sehari-hari. Program GASPOL dipandang bukan sekadar kegiatan pelatihan formal, tetapi sebagai wadah yang memberikan perlindungan, pembekalan, dan dukungan bagi peserta dalam menjalankan aktivitasnya. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rosyidah dan Harmawan (2025)

yang menjelaskan bahwa nilai publik dapat tercipta ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penelitian Putri dan Harsono (2024) juga menunjukkan bahwa legitimasi program pemberdayaan perempuan dapat terbentuk ketika program mampu memberikan manfaat yang relevan bagi kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, *public value* dalam dimensi *trust/legitimacy* pada Program GASPOL terlihat dari terbentuknya kepercayaan peserta terhadap pelaksana program serta pandangan peserta bahwa program yang dijalankan layak dan sesuai dengan kebutuhan perempuan pengemudi ojek online. Nilai publik yang muncul dalam dimensi ini berupa nilai sosial, nilai perlindungan, dan nilai pemberdayaan. Nilai sosial terlihat dari hubungan yang terbuka, komunikatif, dan konsisten antara pelaksana program dan peserta sehingga peserta merasa didampingi dan diperhatikan. Nilai perlindungan terlihat dari adanya pelatihan dan pendampingan yang membantu peserta memperoleh rasa aman, pengetahuan, dan pembekalan dalam menghadapi kerentanan saat bekerja di jalan. Sementara itu, nilai pemberdayaan terlihat dari bertambahnya pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan peserta untuk mengembangkan diri setelah mengikuti program. Dengan demikian, dimensi *trust/legitimacy* dalam Program GASPOL menunjukkan bahwa kepercayaan dan legitimasi program tidak hanya dibangun melalui pelaksanaan program yang konsisten, tetapi juga melalui manfaat nyata yang dirasakan peserta sebagai penerima program.

Pelaksanaan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya upaya penciptaan *public value* melalui dimensi layanan (*service*), hasil (*outcomes*), serta kepercayaan dan legitimasi (*trust/legitimacy*). Nilai publik tersebut terlihat dari layanan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta, manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program, serta terbentuknya kepercayaan peserta terhadap pelaksana program. Secara keseluruhan, program GASPOL menghasilkan nilai ekonomi, nilai sosial, nilai pemberdayaan, nilai kesetaraan, nilai kemandirian, dan nilai perlindungan bagi perempuan pengemudi ojek online. Temuan ini sejalan dengan pemikiran George Frederickson dalam Sakir (2025) tentang *New Public Administration* yang menekankan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan akses, perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok rentan. Dalam konteks ini, program GASPOL menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menghadirkan program pemberdayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan pengemudi ojol sebagai kelompok rentan.

Meskipun demikian, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh peserta. Beberapa peserta masih mengalami kendala dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha yang dimiliki sehingga tetap bergantung pada pekerjaan sebagai pengemudi ojol. Selain itu, keberlanjutan pendampingan dan penguatan usaha peserta masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penciptaan *public value* dalam program pemberdayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan pelatihan, tetapi juga oleh keberlanjutan pendampingan, penguatan keterampilan produktif, serta kemampuan peserta dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, penguatan pada aspek pendampingan lanjutan, pengembangan usaha, dan pelaksanaan pelatihan produktif yang lebih berkelanjutan masih diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkesinambungan oleh seluruh peserta.

KESIMPULAN

Public value atau nilai publik yang tercipta dari pelaksanaan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa program pemberdayaan tersebut tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk pelatihan keterampilan, tetapi juga menghadirkan dukungan sosial, perlindungan, dan pengalaman pemberdayaan bagi perempuan pengemudi ojek online sebagai kelompok sasaran program. Pada dimensi *service*, nilai publik terlihat melalui pelaksanaan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta, pendekatan pelayanan yang komunikatif dan mendukung, serta kemudahan akses informasi dan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Pada

dimensi *outcomes*, program GASPOL memberikan manfaat berupa tambahan keterampilan, peluang usaha, peningkatan rasa percaya diri, berkembangnya kemampuan peserta, serta dukungan sosial yang membantu peserta dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, pada dimensi *trust/legitimacy*, nilai publik terlihat dari terbentuknya kepercayaan peserta terhadap pelaksana program melalui konsistensi pelaksanaan kegiatan, keterbukaan komunikasi, dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, peserta juga memandang Program GASPOL sebagai program yang layak, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan perempuan pengemudi ojol.

Secara keseluruhan, Program GASPOL telah mampu menciptakan *public value* berupa nilai ekonomi, nilai sosial, nilai pemberdayaan, nilai kesetaraan, nilai kemandirian, dan nilai perlindungan bagi perempuan pengemudi ojol. Namun demikian, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh peserta karena masih terdapat peserta yang mengalami kendala dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha yang dimiliki sehingga tetap bergantung pada pekerjaan sebagai pengemudi ojol. Selain itu, keberlanjutan pendampingan dan penguatan usaha peserta masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, penguatan pada aspek pendampingan lanjutan, pengembangan usaha peserta, serta pelaksanaan pelatihan produktif yang lebih intensif dan berkelanjutan masih diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal oleh seluruh peserta.

REFERENSI

- Alifina, T. (2021). Tantangan Perempuan Pengemudi Ojek Online di Kota Surabaya dalam Perspektif Maxine Molyneux. *Jurnal Publique*, 02(01), 64–84.
- Aries Kurniawan, D. (2024). Konstruksi Sosial Berbasis Gender Pengemudi Ojek Online Perempuan di Kota Surabaya. *Prosiding: Resiliensi Indonesia Dalam Pusaran Disrupsi Global*, 250–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1056>
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5NiMy/indeks-ketimpangan-gerder--ikg-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024c). *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>
- Cornwall, A. (2014). Women's Empowerment: What Works and Why? *World Institute for Development Economics Research*, 104(August).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (P. Schroeder (ed.); Sixth edit). SAGE Publications, Inc.
- Dinansyah, K. Y., Bazline, N. A., & Setianingrum, V. D. (2023). *Proses Kerja Gig Economy dalam Perspektif Gender : Studi Kasus Respon Pengemudi Ojek Online Perempuan Gojek dan Grab terhadap Beban Ganda yang Dialami di DKI Jakarta*. 1–11.
- Ikhwan, R., Sri Raharjo, A. S., & Arrozi, A. M. (2024). Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kesetaraan Gender di Sektor Pertanian Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 22(2), 97–109. <https://doi.org/10.21082/akp.v22n1.2024.97-109>
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Pub. L. No. 9 (2000).
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Kelly, G., Mulgan, G., & Muers, S. (2002). Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform. *The Cabinet Office Strategy Unit*, 1–35.
- Marlia, E. W., Puspaningtyas, A., & Widiyanto, M. K. (2024). Evaluasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online Dalam Meningkatkan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di

- Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 73–82.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
- Muthmainnah, S. A., & Kartini, D. S. (2025). Penerapan Public Value Management Melalui Pembinaan Sosial: Studi Kasus di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya. *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 06(01), 14–25. <https://doi.org/10.30656/1g96de77>
- Putri, A., & Harsono, D. (2024). Public Value Dalam Model Kalurahan Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(6), 12. <https://doi.org/10.21831/joppar.v2i6.22633>
- Rosramadhana, Sudirman, Zulaini, Iqbal, M., Sari, P., Siregar, R., & Rachmah, S. (2022). *Model Pemberdayaan Perempuan: Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan*. CV Pena Persada.
- Rosyidah, L., & Harmawan, B. N. (2025). Public Value Layanan Gawat Darurat “SIAGA BRO PSC 119” di Kabupaten Bojonegoro. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(11), 141–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/9cjpqe41>
- Sakir, A. R., Januru, L., Hasirun, D., Putri, D. S., Bilhuda, S., Aska Nela, A. W., Anisah, H. U., Sondakh, A. G., Rahmadio, R. E., & Manarfa, L. O. (2025). *Dasar-Dasar Administrasi Publik: Teori, Praktik, dan Reformasi* (M. Syukrina Sari (ed.); 1st ed.). Akiopedia Press. https://www.researchgate.net/publication/397478975_Dasar-Dasar_Administrasi_Publik_Teori_Praktik_dan_Reformasi
- World Economic Forum. (2024). Global Gender Gap 2024. In *Romania Country Review* (Issue June). World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/in-full/benchmarking-gender-gaps-2024-2e5f5cd886/?gad_source=1&gad_campaignid=22234048793&gbraid=0AAAAAoVy5F42KxF9pHunSDf67pcQxgfwZ&gclid=CjwKCAjwx-zHBhBhEiwA7Kjq65nfmZ2a6AIYtxNYVjnMC_0zzv